



Strategi Efektif Pengeluaran Pemerintah : Mengoptimalkan Belanja Negara Dan Pembelian Barang Dan Jasa

Imelda Eka Maulia¹, Wahjoe Pangestoeti², Damayanti Simangunsong³, Fathur Rahman Ramadhan⁴

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah

Email : Mauliaimel01@gmail.com¹, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id², simangunsongdamayanti@gmail.com³, fathurrahman281003@gmail.com⁴

Abstract : *Government spending is very important for a country's economy and the welfare of all levels of society. In this way, the government must allocate their funds very wisely for the survival of the country and society. Government spending is the result of various types of income, one of which is taxes. But when governments do not have sufficient financial resources, they will resort to forced efforts to take resources from other countries. One of the goals of the government in issuing their budget is to reduce the number of unemployed. The government also poured funds to maintain political stability. In this way the economy will develop with development goals. Moreover, spending to reduce chaos is not cheap. The purpose of using the literature method in this research is so that readers can understand this research on government spending in depth. This research is based on books and several articles circulating on the internet. The result of government spending is the prosperity of the entire society and country. Because with the release of funds from the government, the country's development will be carried out. Government spending will be used for the sustainability of the country and for the prosperity for society.*

Keyword : *Government Spending, Public Spending, material.*

Abstrak : Pengeluaran pemerintah sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Dengan begitu pemerintah harus mengalokasikan dana mereka dengan sangat bijak demi keberlangsungan hidup negara dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan hasil dari berbagai macam pendapatan, salah satunya adalah pajak. Tetapi ketika pemerintahan tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, secara terpaksa mereka akan berupaya untuk mengambil sumber daya dari negeri lain. Salah satu tujuan pemerintah mengeluarkan anggaran mereka adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk menjaga kestabilan politiknya. Dengan begitu perekonomian akan berkembang dengan tujuan Pembangunan. Lagipula pengeluaran untuk meredam kekacauan tidaklah murah. Tujuan digunakannya metode literatur dalam penelitian ini adalah agar pembaca bisa memahami penelitian tentang pengeluaran pemerintah ini secara mendalam. Penelitian ini berbasis pada buku dan beberapa artikel yang beredar di internet. Hasil dari pengeluaran pemerintah adalah kemakmuran seluruh masyarakat dan negara. Karena dengan dikeluarkannya dana dari pemerintah, pembangunan negara akan terlaksana. Pengeluaran pemerintah akan digunakan demi keberlangsungan negara dan untuk kemakmuran seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Publik, Materi.

PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian suatu negara dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang tepat dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengeluaran pemerintah menjadi sangat penting dalam konteks ekonomi makro.

Jurnal ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang pengeluaran pemerintah, termasuk tujuan, kebijakan, dampak, serta faktor-faktor yang memengaruhi

pengeluaran tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai teori ekonomi dan data empiris, jurnal ini akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pengeluaran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis yang disajikan dalam jurnal ini akan meliputi berbagai aspek, seperti alokasi anggaran, efisiensi pengeluaran, konsep pengeluaran, faktor yang mempengaruhi, serta hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan interdisipliner, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi kebijakan publik dan diskusi akademis tentang pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, mari kita menjelajahi kerumitan dan relevansi dari isu pengeluaran pemerintah melalui perspektif ekonomi yang komprehensif. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi para pembaca dalam menggali lebih dalam tentang peran krusial dari kebijakan pengeluaran pemerintah dalam merumuskan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Pengeluaran Pemerintah. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis Buku Ekonomi Publik Penulisnya adalah Dr. Ridwan, SE, M.Si, Ihsan Suciawan Nawir S.STP, M.Si. Buku ini di cetak pada desember 2021 (cetakan I). Kata kunci seperti "pengeluaran pemerintah", "ekonomi publik", dan "pengeluaran pemerintah indonesia" digunakan untuk mencari artikel jurnal, buku, dan laporan terbaru yang membahas topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep walfare state, negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya, dalam konteks ini tidak ada masyarakat yang tidak ingin mencapai kesejahteraan itu sehingga kesejahteraan harus terdistribusi secara merata bukan hanya untuk kalangan tertentu. Kesejahteraan memiliki salah satu pengertian yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik basic need hingga self actualization dalam tori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan menadi sangat kompleks karena dinamika masyarakat yang juga kompleks. Kompleksitas tersebut membuat terbentuknya suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yaitu pemerintahan.

Pemenuhan kebutuhan sangat erat dengan kegiatan konsumsi atau menghabiskan nilai dari suatu hal baik barang maupun jasa.

Kegiatan konsumsi dilakukan ketika ada alat tukar atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkan freewill dalam kegiatan tersebut. Konsep ini berlaku untuk individu maupun organisasi seperti negara. Pemerintah melakukan kegiatan baik konsumsi, produksi dan distribusi namun pada konteks ini, pemerintah di tuntut melakukan kegiatan konsumsi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di negara itu sendiri. Untuk dapat melakukan konsumsi pemerintah ada harga yang harus dibayar, dengan kata lain, ada hal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu, hal tersebut ialah pengeluaran pemerintah dengan definisi penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara tau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.

Pengeluaran pemerintah merupakan perputaran dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam pendapatan salah satunya adalah pajak negara. Secara umum pengeluaran pemerintah diharapkan memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu negara. Karena seperti yang dibahas di atas bahwa pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di suatu negara, telah menjadi konsekuensi pemerintah dalam konsep welfare state bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga ketika ada kebutuhan baik untuk kegiatan pemerintahan maupun pembangunan pemerintah harus sudah stand by untuk memanfaatkan sumber daya finansial yang dimilikinya.

Pengeluaran pemerintah dapat dilakukan atau direalisasikan dengan catatan ada sumber daya yang dapat dikelola dalam hal ini merupakan sumber daya finansial. Ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai maka konsekuensinya negara tersebut harus mencari sumber daya lain diluar yang dimiliki negaranya agar penelenggaraan pembangunan tetap dapat ber-jalan karena ketika terjadi kemandegan dalam pembangunan dapat berdampak luas bagi keseluruhan suatu negara karena negara merupakan satu kesatuan yang bekerja sama saling memengaruhi untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat.

A. Konsep pengeluaran pemerintah

Ada pergeseran paradigma mengenai pengeluaran pemerintah itu sendiri, dahulu pengeluaran pemerinta pada negara-negara berkembang dianggap tidak terlalu memiliki pengaruh dan persentase yang kecil, namun setelah Perang Dunia II selesai, paradigma tersebut berubah. Pada tahun 1973 persentase pajak dari Produk Nasional Bruto untuk masing-masing negara maju dan berkembang adalah: Swedia 43, Perancis 38, Jerman Barat 35, Inggris 35,

Kanada 32, Amerika Serikat 32, Swiss 23, Jepang 21, Spanyol 21, Jamaika 17, Colombia 16, India 15, Filipina 11, Nigeria 9,5, Meksiko 7, Afghanistan 6. Tampaknya agak ganjil bahwa justru di negara-negara yang sedang berkembang di mana peranan pemerintah amat dibutuhkan, persentase pajak ini kecil. Namun peranan pemerintah ini tidak terbatas pada pemajakan dan pengeluaran uang saja. Sampai berapa jauh peranan pemerintah dan negara tergantung pada filsafat negara itu sendiri. Ada negara-negara yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, dan pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pada masa lampau negara seperti ini menganut filsafat *laissez faire* seperti dianut Perancis sesudah Revolusi abad 18 dan sedikit banyak dianut Amerika Serikat. Ada juga negara yang pemerintahnya memimpin dan mengurus hampir segala macam sampai memiliki semua alat produksi. Negara ini menganut filsafat sosialisme/ komunisme. Sebagai produk perkembangan modern Indonesia memberi kesempatan yang besar kepada setiap anggota masyarakat di samping peranan pemerintah yang besar, meskipun persentase pengeluaran pemerintah Indonesia lebih kecil dari pada Amerika Serikat.

Di negara-negara yang dulunya menganut filsafat *laissez faire* juga terjadi perubahan-perubahan yang mengarah pada campur tangan pemerintah yang makin besar. Sedang di negara-negara sosialis / komunis juga terjadi perubahan-perubahan ke arah pemberian kebebasan lebih besar pada anggota masyarakatnya.

B. Pengertian pengeluaran pemerintah

Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja Negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintahan pusat. Pengeluaran pemerintah/ negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Pendapatan dan Pengeluaran Negara, Pengertian dan Contoh (ardra.biz) Pengeluaran pemerintah mengacu pada uang yang dibelanjakan oleh sektor publik untuk perolehan barang dan penyediaan layanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, Jaminan Sosial. Jaminan sosial adalah program pemerintah federal AS yang memberikan jaminan sosial dan manfaat bagi orang-orang dengan pendapatan yang tidak memadai atau tidak ada. Sosial pertama, dan pertahanan.

- Dalam penghitungan pendapatan nasional, ketika pemerintah memperoleh barang dan jasa untuk digunakan saat ini untuk secara langsung memenuhi kebutuhan dan kebutuhan individu atau kolektif masyarakat, ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah.
- Ketika pemerintah memperoleh barang dan jasa untuk digunakan di masa depan, itu diklasifikasikan sebagai investasi pemerintah. Ini termasuk konsumsi publik dan investasi publik, dan pembayaran transfer yang terdiri dari transfer pendapatan.

Pengeluaran publik memungkinkan pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa atau membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ekonomi pemerintah. Kebijakan Moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengatur variabel makro ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Selama bertahun-tahun, kami telah melihat perubahan signifikan dalam peran dan ukuran pemerintah di seluruh dunia. Belanja publik meningkat pesat pada abad ke-20, ketika pemerintah di seluruh dunia mulai membelanjakan lebih banyak dana untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Saat ini, pemerintah negara maju membelanjakan lebih banyak karena persentase Produk Domestik Brut (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran standar kesehatan ekonomi suatu negara dan indikator standar hidupnya. Selain itu, PDB dapat digunakan untuk membandingkan tingkat produktivitas antara berbagai negara dari pada pemerintah negara berkembang.

C. Teori pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu teori makro dan teori mikro.

1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

(Boediono, 1999)

- Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan memengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

2) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang memengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapus sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan memengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga ia bertindak sebagai pengambil output (Output Taker).

3) Tujuan pengeluaran pemerintah

Penyediaan barang dan jasa yang tidak dipasok oleh swasta seperti pertahanan, jalan dan jembatan; barang jasa seperti rumah sakit dan sekolah, dan pembayaran kesejahteraan dan tunjangan termasuk pengangguran. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh penduduk yang menganggur dan pekerjaan yang tersedia di pasar. Pengangguran struktural merupakan peristiwa berkepanjangan yang disebabkan oleh perubahan fundamental dalam perekonomian dan tunjangan kecacatan. Untuk mencapai perbaikan di sisi penawaran ekonomi makro, seperti pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Untuk memberikan subsidi kepada industri yang mungkin membutuhkan dukungan keuangan

baik untuk operasi atau ekspansi mereka. Sektor swasta tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan tersebut dan, karenanya, sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Misalnya, proyek infra-struktur transportasi tidak menarik pendanaan swasta kecuali pemerintah menyediakan pengeluaran untuk industri tersebut.

Faktor yang mempengaruhi :

1. Proyeksi pajak yang akan diterima oleh pemerintah

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diproyeksikan. Jadi sebelum menyusun anggaran belanja, pemerintah harus membuat terlebih dahulu prediksi jumlah pajak yang akan diterima. Semakin besar jumlah pajak yang akan diterima, semakin besar pula belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah.

2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah

Besarnya rencana anggaran pemerintah dipengaruhi juga oleh tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan pemerintah. Beberapa tujuan dari kegiatan pengeluaran pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, mengurangi inflasi yang berlebihan, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk tujuan-tujuan tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pajak.

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan politik dan keamanan stabilitas negara menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja negara. Pemerintah mengeluarkan pembiayaan untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan lainnya. Hal ini bertujuan agar perekonomian dapat berjalan dengan tujuan pembangunan. Kekacauan akibat perselisihan antarsuku membutuhkan biaya besar untuk penyelesaian. Selain itu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dilakukan pada suatu daerah atau negara yang memiliki sengketa sosial, politik, suku, dll. Biaya yang dikeluarkan oleh Pengeluaran Pemerintah pemerintah bisa saja melampaui dari pendapatannya hanya untuk mengatasi sengketa tersebut.

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2 yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni:

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan.

b. Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN dan belanja modal.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam kabupaten/ kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja, bagi hasil pendapatan ke desa/ kelurahan.

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain:

a) Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang.

b) Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c) Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira.

d) Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.

e) Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.

4) Efek ekonomi pengeluaran pemerintah

Pembelian barang dan jasa. Dengan membeli barang dan jasa dari perusahaan swasta dan mempekerakan para pekerja, pemerintah menyediakan berbagai macam layanan, biasanya tanpa biaya eksplisit, ke seluruh masyarakat. Sifat dari kegiatan atau barang-barang ini, yaitu mencakup barang-barang penting seperti jalan raya, rudal, pendidikan, dan polisi. Di sini difokuskan dengan dua karakteristik kesamaan dari semua program tersebut. Fakta bahwa barang dan jasa ini melibatkan penggunaan dalam sumber daya pemerintah, dan bahwa jasa yang dihasilkan diberikan kepada masyarakat baik secara gratis atau harga nominal. Pekerjaan pemerintah pada sumber daya riil seperti tanah, tenaga kerja, bangunan, dan mesin mengartikan bahwa tidak ada barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan output di sektor swasta.

Untuk sebagian besar, belanja semua barang dan jasa pemerintah melibatkan pengorbanan untuk output swasta. Dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah seperti yang diinginkan tercipta hanya jika manfaat terhadap masyarakat melebihi nilai kerugian barang dan jasa sektor swasta. Idealnya, dalam kata lain, nilai dari penggunaan sumber daya baru dalam program pemerintah harus seimbang terhadap program pemerintah yang lebih unggul lainnya. Jika satu program pemerintah lebih baik dari yang lainnya, maka yang terakhir

harus ditolak, dan bahkan yang pertama harus dilepaskan jika sektor swasta menggunakan sumber daya yang sama yang akan menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Pembayaran transfer. Pengeluaran pemerintah, seperti hibah bantuan pengangguran, pembavaran jaminan sosial kepada orang tua, atau subsidi produsen, meningkatkan pendapatan dari penerima tetapi tidak membawa layanan ataupun produk yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Transfer unilateral ini diesensikan negatif dalam pajak, dan pengaruhnya juga

Pembavaran transfer biasanya meningkatkan permintaan untuk output kurang dari pada jumlah yang sama dari belanja barang dan jasa pemerintah yang baru. Yang terakhir ini tidak hanya meningkatkan output nasional dengan jumlah uang yang dihabiskan, tetapi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan aliran sekunder belanja konsumen yang terus meningkat untuk beberapa waktu. Pembayaran transfer bisa sama-sama ekspansif jika penerima menghabiskan jumlah penuh pada keluaran baru. Karena, dalam sebagian besar keadaan, bagian dari transfer akan diselamatkan oleh penerima, peningkatan langsung dalam pengeluaran akan lebih kecil dari jumlah transfer.

Pembelian tanah dan aset yang berjalan. Ketika pemerintah menggunakan sumber daya baru untuk sebuah proyek, itu tidak perlu. Tanah sering diperlukan dan pembelian aset digunakan untuk berbagai jenis alasan ekonomi, terutama jika pemerintah atau kongres bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran pemerintah. Sementara pembelian tanah dan aset lainnya tidak membawa peningkatan output nasional, pembelian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penawaran atas harga set yang bersangkutan.

Pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka biasanya akan mendorong peminjam untuk melakukan keduanya. Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman, dengan kata lain, kemungkinan besar akan digunakan untuk membeli barang dan jasa baru yang lain, transaksi ini akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat dan pendapatan tambahan tersebut akan memulai aliran sekunder pengeluaran yang meningkat. Dengan bersaing dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah dapat membawa liberalisasi tentang persyaratan pinjaman swasta yang akan meningkatkan permintaan baik untuk kredit dan untuk output baru pada bagian dari semua peminjam.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Melalui pencatatan yang akurat dan

transparan, kita dapat memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif. Dengan adanya jurnal pengeluaran pemerintah ini, diharapkan akan tercipta akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Mari terus bekerja sama dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rendah hati, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus atas kontribusi dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembuatan jurnal mengenai pengeluaran pemerintah ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Dr. Ridwan, SE, M.Si & Ihsan Suciawan Nawir S.STP, M.Si. (2021). Buku Ekonomi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Government publication: Heru Setiawan. Kantor Pelayanan Pajak. (2018). Analysis of the Impact of Fiscal & Monetary on Indonesian Macroeconomic Performance with Model Structural Vector Aggression (SVAR). Surabaya: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1-12.
- Report: Bani Fitria. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan & Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Surgawati, I. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 25-34.